

## SISTEM TRANSITIVITAS SURAT PERJANJIAN SRI SULTAN PADUKA GUVERNEMENT HINDIA NEDERLAND DAN PEMERINTAH KERAJAAN BIMA

Nurrahman Diansyah  
STKIP Yapis Dompu  
nurrahmandiansyah91@gmail.com

### ABSTRAK

*Surat perjanjian Sri Sultan Paduka Guvernement Hindia Nederland dan Pemerintah Kerajaan Bima merupakan produk hubungan kedua belah pihak dan berfungsi dalam hubungan itu. Dalam itu, ada pengalaman sosial yang terwujud dalam variasi gambaran pengalaman linguistik. Pengalaman linguistik ini dianggap berkembang karena surat perjanjian kedua belah pihak selalu diperbaharui dari tahun ke tahun. Tujuannya untuk memperkuat kontrak terdahulu. Hal ini penting untuk dimaknai karena perjanjian awal kedua belah pihak bermakna perdamaian, persahabatan, dan pengakuan hak monopoli Hindia Nederland atas perdagangan. Pengalaman linguistik tersebut dapat dimaknai melalui pola pemakaian aspek tata bahasa. Oleh karena itu, sasar kaji dalam tulisan ini difokuskan pada sistem transitivis (pengalaman linguistik) karena sistem transitivitas menguak dimensi semantik dengan cara menguraikan elemen-elemen terkecil yang mengkonstruksi leksikogramatikal. Elemen terkecil itu adalah komponen proses, partisipan, dan sirkumstan. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan sistem transitivitas surat perjanjian sehingga diperoleh gambaran kekuasaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, teori yang digunakan ialah teori Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) Halliday. Kemudian, data dikumpulkan dengan metode pustaka yang disertai dengan teknik baca dan catat, sebab penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dihadapkan dengan data berupa kata, frase, kalimat, dan wacana. Melalui teknik baca, data dicermati untuk dialihhejakan ke Ejaan Yang Disempurnakan sebab teks surat perjanjian masih menggunakan Ejaan Suwandi dan berbahasa Belanda. Sejalan dengan itu, kegiatan mendata dan melihat relasi antara konstruksi kata, frasa dan klausa dilakukan melalui teknik catat. Setelah data terkumpul, penganalisisan sistem transitivitas diawali dengan surat perjanjian dipilah per klausa dan klausa-klausa tersebut diberikan nomor data. Selanjutnya, klausa-klausa yang sudah bernomor dianalisis sistem transitivitas menggunakan tabel analisis. Setelah itu, hasil analisis elemen pengalaman linguistik dipresentasikan masing-masing. Langkah terakhir adalah menggeneralisasikan atau menyimpulkan hasil pemaknaan terhadap teks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hindia Nederland diposisikan sebagai pihak yang superior dan Kerajaan Bima sebagai pihak yang inferior. Kemudian, ada perkembangan kekuasaan Hindia Nederland terhadap Kerajaan Bima dari masa ke masa.*

Kata kunci: *surat perjanjian, transitivitas, linguistik fungsional*

### PENDAHULUAN

Hubungan tertulis Bima dan VOC ditandai dengan penandatanganan perjanjian pada 8 Desember 1669, antara Kerajaan Bima dan Admiraal Speelman, yang berisi perdamaian dan persahabatan, serta pengakuan hak monopoli Belanda atas perdagangan (Salahuddin, 2014:7). Semakin lama, surat perjanjian ini digunakan sebagai usaha hegemoni kekuasaan. Terkait dengan itu, Halliday dan Hasan (1992:13) mengatakan teks (surat perjanjian) merupakan bahasa yang berfungsi atau sedang menjalankan tugas tertentu dalam konteks situasi. Berdasarkan itu, surat perjanjian menjalankan fungsi hegemoni.

Hegemoni kekuasaan ini berjalan lancar. Hindia Nederland telah menguasai penuh lingkungan istana, sehingga berujung dengan perjanjian yang dikenal dengan “Contract Met Bima”. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Kerajaan Bima benar-benar berada dalam wilayah hegemoni Hinda Nederland. Cara Hindia Nederland menguasai Kerajaan Bima, yaitu perjanjian diperbaharui dari masa ke masa. Tujuan pembuatan kontrak baru melalui surat perjanjian dimaksudkan untuk memperkuat kontrak-kontrak sebelumnya karena ada pengalihan tahta kerajaan ke sultan berikutnya. Siasat ini memposisikan Kerajaan Bima berada dalam kekuasaan Hindia Nederland.

Alat bukti yang dapat menjawab fenomena jatuhnya Kerajaan Bima di tangan Hindia Nederland yakni naskah perjanjian. Menguak surat perjanjian berarti membuka akses masa lalu, sehingga dapat direpresentasikan pengalaman pada masa itu. Bagaimanapun surat perjanjian dianggap sebagai bagian dari satu realitas pada zamannya. Dengan demikian, surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 4 November 1920 merupakan bukti untuk menguak aktivitas pada saat itu.

Makna teks surat perjanjian yang ditata dalam sistem bahasa pada masa itu merupakan realisasi dari pengalaman penulis teks yang bersangkutan. Eggins (2004:8) mengatakan teks adalah segala bentuk aktifitas manusia dalam berkomunikasi dengan siapa pun. Selanjutnya, Coultas (2003:4) mengatakan bahwa makna-makna teks yang digunakan oleh masyarakat dibangun oleh konteks sosial. Oleh karena itu,

makna teks ini dapat dieksplorasi apabila diuraikan menurut konteks sosial, dideskripsikan hubungan tata bahasa dengan konteks sosial, dan ditentukan pola pemakaian aspek tata bahasa. Struktur bahasa (*lexicogrammer*) ditentukan oleh fungsi apa yang dilakukan bahasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat, yaitu memaparkan, mempertukarkan, dan mengorganisasikan pengalaman. Ketiga fungsi ini oleh Halliday disebut sebagai metafungsi bahasa yang akan menentukan struktur bahasa (Halliday, 2014 & Saragih 2006:25).

Surat perjanjian pada saat itu berada pada proses sosial masa kerajaan. Corak sosial kerajaan akan menentukan dan ditentukan bahasa. Oleh karena itu, variasi pengalaman sosial itu terwujud dalam variasi gambaran pengalaman linguistik. Realisasi pengalaman linguistik pemakai bahasa inilah yang disebut transitivitas. Dalam kajian LFS, Halliday (2004:107) mengemukakan bahwa satu unit pengalaman yang sempurna direalisasikan dalam klausa yang terdiri atas (1) proses, (2) partisipan, dan (3) sirkumstan.

Proses merupakan kegiatan atau aktivitas dalam klausa yang direalisasikan oleh kelas verba (Bloor and Bloor, 2004:109). Oleh karena itu, proses dapat dikatakan sebagai inti dari suatu pengalaman. Proses ini dapat ditentukan dengan keberadaan partisipan, baik jumlah dan kategorinya (Halliday, 2004:168). Berbeda dengan partisipan, sirkumstan berada di luar jangkauan proses. Sirkumstan merupakan lingkungan, sifat, atau lokasi tempat berlangsungnya suatu proses.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini memanfaatkan metode deskripsi kualitatif untuk menafsir secara kritis bahan kajian dengan menggunakan teori LFS. Terkait dengan itu, data dalam penelitian ini adalah Surat Perjanjian Sri Sultan Paduka Guvernement Hindia Nederland dan Pemerintah Kerajaan Bima. Data dikumpulkan dengan metode pustaka yang disertai dengan teknik baca dan catat, sebab penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dihadapkan dengan data berupa kata, frase, kalimat, dan wacana. Melalui teknik baca, data dicermati untuk dialihjemakan ke EYD, sebab teks surat perjanjian masih menggunakan Ejaan Suwandi dan berbahasa Belanda. Sejalan dengan itu, kegiatan mendata dan melihat relasi antara kontstruksi kata, frasa dan klausa dilakukan melalui teknik catat. Setelah data terkumpul, penganalisan sistem transitivitas melalui prosedur penganalisan data kualitatif yang diajukan Milles dan Huberman (2014:16); dibandingkan dengan Creswell (2015:250), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Tahap reduksi data, penganalisan sistem transitivitas diawali dengan surat perjanjian dipilah per klausa. Kemudian, klausa-klausa tersebut diberikan nomor data secara berurutan. Tahap penyajian data, klausa-klausa yang sudah bernomor dianalisis sistem transitivitas. Setelah itu, hasil penganalisan transitivitas diolah dengan metode statistik sederhana dalam bentuk tabel-tabel sederhana. Tahap penarikan simpulan, peneliti menggeneralisasikan atau menyimpulkan hasil pemaknaan terhadap teks perjanjian

## **ANALISA**

### **Deskripsi Data**

Surat perjanjian Sri Sultan Paduka Guvernement Hindia Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Bima diperoleh di Museum Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor inventaris 4635. Surat perjanjian ini dibuat dalam bentuk buku yang ditulis dengan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 4 November 1920 merupakan pengalaman kedua belah pihak pada masa itu. Pengalaman tersebut dapat dikuak melalui sistem transitivitas surat perjanjian.

### **Sistem Transitivitas Surat Perjanjian Sri Sultan Paduka Guvernement Hindia Nederland dan Pemerintah Kerajaan Bima**

Sistem transitivitas merujuk pada ciri klausa yang mengungkapkan pengalaman penulis surat perjanjian tentang fenomena yang dialami. Sistem transitivitas sebuah bahasa menggambarkan fakta pengalaman surat perjanjian yang direalisasikan komponen proses, partisipan, dan sirkumstan. Pada umumnya, ketiga komponen tersebut direalisasikan oleh frase verba, frase nomina, dan frase adverbial atau frase preposisional di dalam klausa.

### **Proses, Partisipan, dan Sirkumstan**

Proses merupakan aktivitas yang terkandung di dalam klausa. Proses dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pengalaman utama (proses primer) dan pengalaman pelengkap. Pengalaman utama terdiri atas proses material, proses mental, dan proses relasional, sedangkan pengalaman pelengkap terdiri atas proses perilaku (behavioral), proses verbal, dan proses wujud (eksistensial) (Halliday, 1994:107; Saragih,

2006:29 dan Sinar, 2013:30). Proses direalisasikan oleh bentuk verba atau predikat dalam pandangan struktural. Dalam pada itu, proses dapat dikatakan sebagai inti dari pengalaman linguistik. Uraian pengamalan linguistik dapat dicermati berikut ini.

**Data 1.** *Sri Paduka Guvernement mendirikan benteng.*

<b>Sri Paduka Guvernement</b>	<b>mendirikan</b>	<b>benteng</b>
Pelaku	Proses Materil.	Gol
Grp. Nomina	Grp. Verba	Grp. nomina

**Data 2.** *Maka pemerintah kerajaan akan menghormati Sri Paduka Tuan Resident.*

<b>Maka</b>	<b>pemerintah kerajaan</b>	<b>akan menghormati</b>	<b>Sri Paduka Tuan Resident</b>
Konj.	Pengindera	Mental	Fenomenon
Grp.Konj.	Grp. Nomina	Grp. verba	Grp. Nomina

**Data 3.** *Batas Kerajaan Bima yaitu: pada sebelah utaranya laut jawa, pada sebelah baratnya Kerajaan Dompnu, pada sebelah selatannya Samudra Hindia, pada sebelah timurnya sungai Wai Moke (Ai Mere) dari kuala ditepi laut selatan pulau Flores mudik sehingga kuala Sungai Wai Buboh, dan lagi kerajaan Riaong.*

<b>Batas Kerajaan Bima</b>	<b>yaitu</b>	<b>pada sebelah utaranya laut jawa, pada sebelah baratnya Kerajaan Dompnu, pada sebelah selatannya Samudra Hindia, pada sebelah timurnya sungai Wai Moke (Ai Mere) dari kuala ditepi laut selatan pulau Flores mudik sehingga kuala Sungai Wai Buboh, dan lagi kerajaan Riaong</b>		
Bentuk	Pro.Rel.I.	Par.N.		
Grp.N.	Grp.V.	Grp.Adv		

**Data 4.** *Jika saudagar itu tinggal di situ lebih dari tiga bulan lamanya.*

<b>Jika</b>	<b>saudagar itu</b>	<b>tinggal</b>	<b>di situ</b>	<b>lebih dari tiga bulan lamanya.</b>
Konj.	Par.Pet.L.	Pro.Ting.	Sir.Lok.Tpt.	Sir.Ren.Wkt.
Grp.Konj.	Grp.N.	Grp.V.	Grp.Adv.	Grp.Adv.

**Data 5.** *Maka pemerintah kerajaan menerangkan siapa yang dikehendaki menjadi gantinya itu dengan menurut sepanjang adat istiadat dan semufakat dengan Sri Paduka Tuan Resident.*

<b>Maka</b>	<b>pemerintah kerajaan</b>	<b>menerangkan</b>	<b>siapa yang dikehendaki menjadi gantinya itu</b>	<b>yang dengan menurut sepanjang adat istiadat dan semufakat dengan Sri Paduka Tuan Resident.</b>
Konj.	Par.Pemb.	Pro.Ver.	Par.Prktn.	Sir.Cr.
Grp.Konj	Grp.N.	Grp.V.	Grp.N.	Grp.Adv.

**Data 6.** *Akan tetapi jika terbit kerugian dari pada hal yang sedimikian itu.*

<b>akan tetapi jika</b>	<b>terbit</b>	<b>kerugian</b>	<b>dari pada hal yang sedimikian itu</b>
Konj.	Pro.Wuj.	Par.Mauj.	Sir.Mslh
Grp.Konj.	Grp.V.	Grp.N	Grp.Adv.

Berdasarkan penganalisisan data di atas, kemunculan proses dalam surat perjanjian sangat berbeda. Ada beberapa proses yang mendominasi, sebaliknya beberapa proses yang minim kemunculannya. Kemudian, beberapa proses hampir sama tingkat kemunculannya. Tingkat kemunculan proses berturut-turut adalah proses material (47,77%), proses relasional (19,29%), proses mental (18,10%), proses verbal (7,12%), proses wujud (6,83%), dan proses tingkah laku (0,89).

Lebih lanjut, proses material dibagi menjadi tiga yakni proses material melakukan (*doing*) (86,95), menciptakan (*creating*) (9,32%), dan kejadian (*happening*) (3,73%). Jenis proses material yang lebih dominan muncul adalah proses material melakukan. Tingkat kemunculan tinggi pada proses material berjenis melakukan (*doing*) mengendapkan makna tertentu. Kecenderungan dominasi proses material jenis ini sesungguhnya menggambarkan tentang partisipan yang peran sebagai superior dan partisipan yang berperan sebagai imperior. Sebab, pengalaman partisipan dapat dibedakan dari kualitas

kegiatan yang pernah dilakukan (lihat Lipson, 2004:47). Secara umum, partisipan dalam surat perjanjian digolongkan menjadi dua, yakni Pemerintah Hindia Nederland dan Pemerintah Kerajaan Bima. Ihwal kedudukan partisipan ini dapat dicermati pada tabel berikut.

**Tabel. 1 Proses Material**

<b>Pemerintah Hindia Nederland</b>	<b>Pemerintah Kerajaan Bima</b>
<b><i>mensyahkan perjanjian, menceraikan wilayah kerajaan, menunjuk raja, menghadiri kerapatan kerajaan, memecat sultan, mensyahkan pengganti sultan, mengangkat menteri, meletakkan pegawai Hollanda, menuntu perkara, memimpin dan memeriksa pengadilan, dan mengatur hasil kerajaan.</i></b>	<i>menjalankan segala kewajiban dan pemerintah kerajaan, menyerahkan tanah, memberi pertolongan, menjaga keamanan dan kesentosaan, meminta pertolongan Hindia Nederland, memungut hasil bea cukai pajak, dan memperusahakan sawah adat</i>

Pemerintah Kerajaan Bima dan Pemerintah Hindia Nederland berfungsi sebagai partisipan melakukan kegiatan. Akan tetapi, ada perbedaan kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak. Perbedaan itu tampak pada jenis kegiatan yang dilakukan. Pemerintah Hindia Nederland melakukan kegiatan-kegiatan strategis di dalam kerajaan. Lebih dari itu, kegiatan yang dilakukan pemerintah Hindi Nederland berhubungan dengan pemerintah Kerajaan Bima. Dengan kalimat lain, pemerintah Kerajaan Bima diposisikan sebagai gol. Berbeda dengan itu, Pemerintah Kerajaan Bima melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Nederland. Dengan demikian, Pemerintah Hindia Nederland berkedudukan sebagai partisipan yang superior dan Pemerintah Kerajaan Bima berkedudukan sebagai partisipan yang imperior.

Kemudian, kedudukan superior dan imperior tersebut dapat dibuktikan dengan kemunculan proses mental berada di urutan ketiga. Kedudukan itu sangat jelas tampak pada jenis verba seperti pada tabel berikut.

**Tabel. 2 Proses Mental**

<b>Pemerintah Hindia Nederland</b>	<b>Pemerintah Kerajaan Bima</b>
<b><i>mengabulkan perjanjian, menetapkan wilayah, orang yang menggantikan sultan, peraturan, undang-undang hukuman, bandar pelabuhan, peraturan barang perang, hasil laut, peraturan air sawah, keamanan, tambang, luas dan letak sawah, dan perolehan sawah adat, memanjatkan mentri, menimbang orang yang dihukum dan ongkos pertolongan kapal, dan mengizinkan peraturan hal gunakan tanah.</i></b>	<i>bersetia, menjunjung titah Hindia Nederland, menurut nasehat, perjanjian, peraturan air sawah Hindia Nederland, menghormati Hindia Nederland, menerima keputusan Hindia Nederland, menurut perjanjian, takluk kepada mejelis, hakim, dan peradilan Hindia Nederland, dan meridoi segala keputusan Hindia Nederland, memegang setia dan kekal perjanjian.</i>

Merujuk pada aktivitas mental kedua belah pihak, Pemerintah Hindia Nederland mengalami hal-hal yang sifatnya strategis dan aktif, sedangkan Pemerintah Kerajaan Bima mengarah pada hal-hal yang sifat pasif dan penundukan. Jadi, sangat jelas bahwa partisipan yang superior itu adalah Pemerintah Hindia Nederland.

Kekuasaan Pemerintah Hindia Nederland terhadap Pemerintah Kerajaan Bima menyebabkan perkembangan kekuasaan Pemerintah Hindia Nederland terhadap Pemerintah Kerajaan Bima. Perkembangan ini dapat dicermati pada pengalaman material dan mental pada dua tabel di atas (bandingkan dengan Salahuddin, 2014:7). Dalam pada itu, aktivitas material yang terkait dengan pergantian sultan dan menteri, wilayah kerajaan, mengangkat raja berdasarkan wilayah pembagian, pengadilan kerajaan, dan hasil kerajaan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Hindia Nederland. Selanjutnya, perkembangan kekuasaan pada aktivitas mental berkaitan dengan undang-undang hukuman, bandar pelabuhan, peraturan barang perang, hasil laut, peraturan air sawah, keamanan, tambang, luas dan letak sawah, dan perolehan sawah adat.

Dua pengalaman itu didukung oleh pengakuan Pemerintah Kerajaan Bima. Pengakuan itu diendapkan pada verba *mengaku*. Verba ini hadir tujuh kali dalam surat perjanjian dan partisipan pembicaranya adalah orang-orang Pemerintah Kerajaan Bima. Pemerintah Kerajaan Bima mengakui tentang wilayah kerajaan, beraja kepada Hindia Nederland, menurut perintah Hindia Nederland, tidak membicarakan ihwal kerajaan kepada orang lain, dan tidak berhak atas perolehan sawah adat. Kemudian,

pengakuan itu dikuat oleh proses verba *berjanji* dan *bersumpah*. Partisipan pembicara verba itu adalah Pemerintah Kerajaan Bima.

## SIMPULAN

Tingkat kemunculan proses pada surat perjanjian yakni proses material (47,77%), proses relasional (19,29%), proses mental (18,10%) , proses verbal (7,12%), proses wujud (6,83%), dan proses tingkah laku (0,89). Pada aktivitas material, Pemerintah Kerajaan Bima dan Pemerintah Hindia Nederland berfungsi sebagai partisipan melakukan kegiatan. Namun, ada perbedaan kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak. Perbedaan itu tampak pada jenis kegiatan yang dilakukan. Pemerintah Hindia Nederland melakukan kegiatan-kegiatan strategis di dalam kerajaan, sedangkan Pemerintah Kerajaan Bima melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan strategis itu. Dengan demikian, Pemerintah Hindia Nederland berkedudukan sebagai partisipan yang superior dan Pemerintah Kerajaan Bima berkedudukan sebagai partisipan yang imperior.

## REFERENSI

- Bloor, Thomas & Bloor, Meriel. 2004. *The Functional Analysis of English: A Hallidayan Approach*. London: Arnold.
- Booth, Wayne C., dkk.. 1995. *The Craft of Research*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Creswell, J. W.. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi dari judul *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Coults, Amanda. 2003. *Language and Social Context*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Eggs, Suzanne. 2004. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Continuum.
- Halliday, M.A.K. & Christian M.I.M Matthiessen. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Arnold.
- Halliday, M.A.K. & Christian M.I.M Matthiessen. 2014. *Halliday's introduction to functional grammar (Fourth Edition)*. London and New York: Routledge.
- Halliday, M.A.K. & Hasan, Ruqaiya. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Diterjemahkan oleh Asruddin Barori Tou & M. Ramlan dari judul *Language, Context, and Text: Aspect of Language in a Social-Semiotic Perspective*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lipson, Maxine. 2004. *Exploring Functional Grammar*. Bologna: University of Bologna.
- Milles, Matthew B. and Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Salahuddin, Siti Maryam. 2014. *Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan Bima (Rekonstruksi Historis dari Naskah-naskah Kuno Peninggalan Kesultanan Bima)*. Bima: Yayasan Museum Kebudayaan SAMPARAJA Bima.
- Saragih, Amrin. 2006. *Bahasa dalam Konteks Sosial*. Medan: Program Pascasarjana UNIMED.
- Sinar, Tengku Silvana. 2012. *Teori dan Analisis Wacana: Pendekatan Linguistik Sistemik-Fungsional*. Medan: CV. MITRA Medan.

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurrahman Diansyah  
Institusi : STKIP Yapis Dompu  
Pendidikan :  
★ S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah  
★ S2 Pendidikan Bahasa Indonesia  
Minat Penelitian :  
★ Discourse Analysis  
★ Sociolinguistics